

REGIONAL EXPENDITURE AGRICULTURAL SECTOR AND VILLAGE FUNDS ON POVERTY RATE THROUGH GRDP OF AGRICULTURAL SECTOR

Prasetyo Yuli Usaid^{1*}, Ahmad Yunani²

¹ Magister of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

² Faculty of Economics and Business, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
*corresponding author

Email: tyousaid86@gmail.com

History of Article : received November 2021, accepted November 2021, published November 2021

Abstract – The rural poverty rate in South Kalimantan Province decreased in 2018 amidst the poverty rate between rural and urban areas is still relatively high. However, the high rate of urban population exceeding rural areas is followed by a higher poverty rate in rural areas than in cities. This research is quantitative research using Partial Least Square (PLS) data analysis. This research was conducted in South Kalimantan Province. Election of South Kalimantan Province for the 2016-2017 period. The purpose of this study is to analyze how much influence the Agricultural Sector Regional Expenditures and Village Funds have on the agricultural sector GRDP, then the effect on its poverty rate. The results show that the Regional Expenditures for the Agricultural Sector Program and village funds do not significantly increase the GRDP of the Agricultural Sector. Regional Expenditures for the Agricultural Sector Program and village funds have a significant influence on the Poverty Rate. The GRDP of the Agricultural Sector has a significant influence on the Poverty Rate. Regional Expenditures for the Agricultural Sector Program through the GRDP of the Agricultural Sector and Village Funds do not have a significant effect on reducing the Poverty Rate in South Kalimantan

Keywords : Regional Expenditures, Agricultural Sector Programs, Village Funds, Poverty Rates, Agricultural Sector

BELANJA DAERAH SEKTOR PERTANIAN DAN DANA DESA TERHADAP ANGKA KEMISKINAN MELALUI PDRB SEKTOR PERTANIAN

Prasetyo Yuli Usaid^{1*}, Ahmad Yunani²

¹ Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

² Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
*corresponding author

Email: tyousaid86@gmail.com

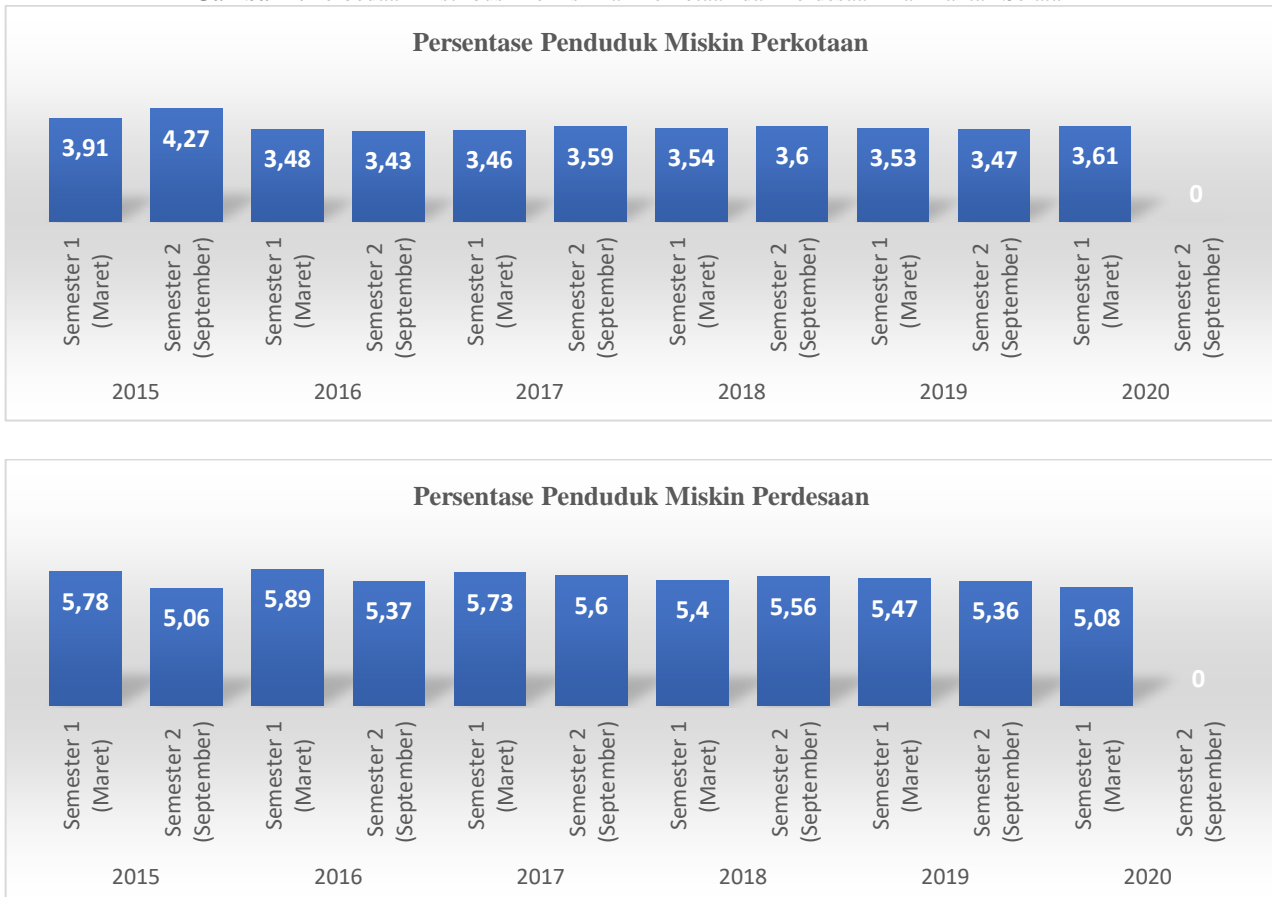
Abstrak - Angka kemiskinan pedesaan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun mengalami penurunan, ditengah angka kemiskinan antar pedesaan dengan perkotaan yang relatif masih terbilang cukup tinggi. Tingginya laju populasi perkotaan daripada wilayah pedesaan disertai besarnya tingkat kemiskinan di desa dibandingkan kota. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data *Partial Least Square (PLS)*. Penelitian ini dilaksanakan pada 11 kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kekuatan pengaruh belanja daerah aktivitas pertanian dan dana desa terhadap PDRB Sektor Pertanian, kemudian pengaruhnya pada tingkat kemiskinannya. Hasilnya menunjukkan belanja daerah program sektor pertanian dan dana desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB Sektor Pertanian. Belanja Daerah Program Sektor Pertanian dan dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan. PDRB Sektor Pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan. Belanja Daerah Program Sektor Pertanian Melalui PDRB Sektor Pertanian dan Dana Desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan Angka Kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Program Pertanian, Dana Desa, Kemiskinan, PDRB Sektor Pertanian

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan perekonomian Indonesia yang masih harus diselesaikan. Sebagai negara berkembang, Indonesia sedikitnya masih mengalami tingkat kemiskinan dengan rata-rata 2015 - 2020 masih diatas 9 persen. Terlebih di perdesaan, dalam kurun waktu tersebut menunjukkan angka yang selalu lebih tinggi dari pada di perkotaan. Hal ini serupa yang terjadi di Kalimantan Selatan yang menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di perdesaan selalu lebih besar daripada wilayah perkotaan.

Gambar 1. Perbedaan Distribusi Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Kalimantan Selatan



Sumber: Data BPS (diolah), 2020

Berdasarkan data kemiskinan perdesaan perkotaan diatas, menunjukkan telah terjadi perbedaan pada ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga mendorong perpindahan masyarakat desa ke wilayah perkotaan. Perpindahan aliran penduduk dari desa ke kota ini juga menjadi ciri khas permasalahan Indonesia umumnya, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemiskinan pada konsepnya diukur dari segi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs approach*) yang terdiri atas makanan dan bukan makanan. Masyarakat dengan pengeluaran dibawah suatu garis kemiskinan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah dikatakan penduduk miskin. Adapun garis kemiskinan terdiri atas garis kemiskinan makanan dan bukan makanan.

Garis Kemiskinan Makanan disetarakan dengan 2100 kalori perhari perkapita merupakan suatu kebutuhan yang dianggap minimum untuk dipenuhi yang diwakili terperinci oleh 52 jenis makanan. Selanjutnya untuk Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) mengacu pada kebutuhan perumahan, pakaian, kesehatan, serta pendidikan.

Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha 2014–2017 Kalimantan Selatan

| Lapangan Usaha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 18.752,98 | 20.559,27 | 21.828,08 | 23.291,70 |
| Pertambangan dan Penggalian | 34.434,08 | 31.304,93 | 30.632,03 | 33.117,79 |
| Industri Pengolahan | 16.563,93 | 18.599,68 | 20.734,29 | 22.958,82 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 89,22 | 138,71 | 176,43 | 206,91 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 478,54 | 533,93 | 582,36 | 645,16 |
| Konstruksi/Construction | 9.191,51 | 10.626,76 | 11.593,34 | 12.777,20 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10.741,09 | 12.400,19 | 13.763,21 | 15.446,09 |
| Transportasi dan Pergudangan | 7.491,67 | 8.547,11 | 9.387,06 | 10.338,60 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2.369,57 | 2.648,83 | 2.869,53 | 3.143,5 |
| Informasi dan Komunikasi | 4.075,74 | 4.504,56 | 4.990,10 | 5.535,38 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 4.272,13 | 4.718,90 | 5.204,76 | 5.738,71 |
| Real Estat | 2.747,27 | 3.053,52 | 3.299,07 | 3.524,63 |
| Jasa Perusahaan/Business Activities | 756,06 | 851,62 | 944,42 | 1.053,37 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7.278,32 | 8.621,08 | 9.034,50 | 9.485,82 |
| Jasa Pendidikan | 5.150,46 | 5.848,92 | 6.622,98 | 7.309,94 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2.142,22 | 2.534,14 | 2.856,57 | 3.078,92 |
| Jasa lainnya | 1.347,47 | 1.563,97 | 1.760,83 | 1.941,26 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 127.882,28 | 137.056,12 | 146.279,57 | 159.593,85 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2018

Berdasarkan data diatas (tabel 1) kinerja perekonomian Kalimantan Selatan dari tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan peningkatan. Penopang tertinggi PDRB Kalsel adalah Pertambangan dan Penggalian, hal tersebut disebabkan energi yang umumnya digunakan berasal dari bahan bakar fosil Pertambangan dan Penggalian masih menjadi favorit penuplai energi terbesar di dunia. Lebih lanjut, bahan bakar termasuk energi sumber daya yang berangsur-angsur akan menipis dan sulit untuk diperbaharui. Sumber daya alam di prediksi akan langka dan kemudian habis, maka hal tersebut akan berdampak pada kondisi ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu peneliti juga berpendapat adanya perubahan penggunaan energi sumber daya alam yang akan digantikan dengan energi terbarukan maka akan menurunkan permintaan terhadap Pertambangan dan Penggalian yang nantinya akan menurunkan PDRB Kalimantan Selatan yang selama ini menjadi pemimpin puncak penyumbang tertinggi.

Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menempati posisi tertinggi kedua setelah sektor Pertambangan dan Penggalian. Dengan demikian dapat disimpulkan peran sektor pertanian sangat dominan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, dengan kewenangan yang hampir penuh atas penggunaan sumber-sumber fiskal pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan memanfaatkan sumber daya yang sejalan dengan kultur geografis.

Sektor pertanian masih cukup berpotensi sebagai solusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah saat ini dan yang akan datang khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya prioritas khusus dalam mengembangkan sektor pertanian melalui anggaran belanja daerah pada program sektor pertanian dengan menekankan pada pertanian berbasis inovasi teknologi.

Belanja wilayah mengacu Undang- Undang Nomor. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja wilayah merupakan seluruh kewajiban Wilayah yang diakui selaku pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Belanja Wilayah sebagaimana diartikan dalam Pasal 20 ayat(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Wilayah diklasifikasikan bagi organisasi, peranan, program serta aktivitas, dan tipe belanja.

Berdasarkan Afiah (2009), belanja wilayah merupakan kewajiban pemerintah wilayah yang diakui selaku pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja wilayah, meliputi seluruh pengeluaran dari rekening kas universal wilayah yang kurangi ekuitas dana, ialah kewajiban wilayah dalam satu tahun anggaran serta tidak hendak diperoleh pembayarannya kembali oleh wilayah.

Belanja daerah diindikasikan berkaitan dengan anggaran daerah karena belanja daerah merupakan bagian dari anggaran daerah. Belanja daerah Provinsi Kalimantan selatan dibagi menjadi dua klasifikasi yang pertama belanja Belanja Tidak Langsung yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan belanja tidak terduga. Yang kedua belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Berikut data belanja daerah yang terkait pada penelitian ini baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Mengacu data, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 2016 sebesar 1.464.402.000 dan pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 1.464.402.000. Kemudian diketahui pada belanja tidak langsung pada poin belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 2016-2017 tidak mengalami peningkatan dengan jumlah 1.464.402.000. Kemudian pada belanja langsung pada poin belanja modal Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2017 mengalami penurunan dari 1.348.396.270 menjadi 1.212.684.169, sedangkan pada belanja langsung Belanja Barang dan Jasa 2016-2017 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1.410.377.265 menjadi 1.381.537.514.

Selain belanja daerah, dana desa merupakan bagian utama dalam menstimulasi perekonomian. Mengacu PP RI No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pembagian Alokasi Dana Desa sedikitnya 10% bagi kabupaten yang diperuntukan desa secara proposional. Oleh karena itu, desa juga berkewajiban untuk menstimulasi kualitas pelayanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan. Dengan demikian pembangunan desa dilakukan bersama-sama baik masyarakat desa maupun pemerintah daerah dengan melakukan perencanaan yang berkesinambungan, sehingga desa mampu memberikan sumbangsih pada skala nasional maupun daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh adanya peningkatan dana desa dari tahun 2016 sebesar 1.125.244.835 dan 2017 sebesar 1.430.375.412. Dana desa Provinsi Kalimantan Selatan di bagi 11 Kabupaten Dengan demikian dapat disimpulkan semakin melonjak pengeluaran pemerintah berupa investasi demi pelayanan kepada masyarakat serta semakin tinggi pula manfaat pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, dan pada gilirannya mewujudkan penerimaan pajak kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin tinggi. Selain itu, pengeluaran pemerintah jika tepat sasaran juga akan meningkatkan berlipat ganda pada PDRB Provinsi Kalimantan Selatan.

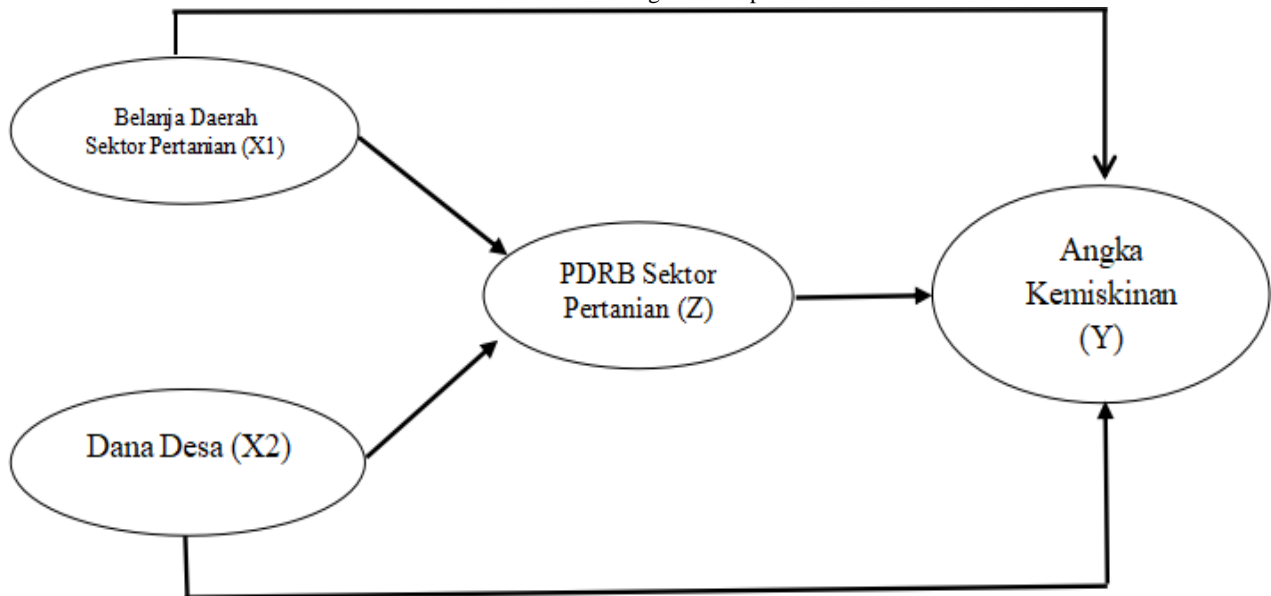
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran belanja aktivitas pertanian, dana desa terhadap PDRB sektor pertanian dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka tentang sejauh mana pengeluaran pemerintah yang telah dilakukan memberikan efek kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Selatan 2015-2020, khususnya di wilayah perdesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus menganalisis faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi angka kemiskinan dan PDRB sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi yaitu belanja daerah program sektor pertanian dan dana desa. Periode observasi penelitian tertuju pada tahun 2015-2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara statistik, yakni menganalisa dengan berbagai dasar statistik dengan cara membaca tabel, grafik atau angka yang telah tersedia kemudian dilakukan beberapa uraian atau penafsiran dari data-data tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan *pusposive* di pada 11 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara dokumentasi. Unit analisis mencakup data panel 2015-2018 yaitu Belanja Daerah Sektor Pertanian, Dana Desa, Angka Kemiskinan, dan PDRB Sektor Pertanian yang bersumber pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan; Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan.

Gambar 2. Kerangka Konseptual



Sumber: model penelitian, 2021

Teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS ver 3 for windows. Variabel exogen/bebas telah digunakan yaitu (X1) yaitu Belanja Daerah Sektor Pertanian, (X2) yaitu Dana Desa. Variabel endogen/terikat mencakup Variabel (Y) yaitu Angka Kemiskinan; dan (Z) yaitu PDRB Sektor Pertanian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan T-Statistic dan t-value dengan kepercayaan 95%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Output Pengujian Hipotesis

| Variabel | T Statistik | P Value |
|---------------------------------------------|-------------|---------|
| Belanja Pertanian (X1) → PDRB Pertanian (Z) | 0,797 | 0,426 |
| Belanja Pertanian (X1) → Kemiskinan (Y) | 2,032 | 0,043 |
| Dana Desa (X2) → PDRB Pertanian (Z) | 0,529 | 0,597 |
| Dana Desa (X2) → Kemiskinan (Y) | 2,644 | 0,008 |
| PDRB Pertanian (Z) → Kemiskinan (Y) | 3,540 | 0,000 |

Sumber : hasil penelitian, 2021

H1: Diduga Belanja daerah program sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap PDRB Pertanian di Kalimantan Selatan. Berdasarkan tabel diatas diketahui Belanja daerah program sektor pertanian terhadap PDRB Pertanian (X1 → Z) dilihat *p-value* sebesar 0,426 > dari $\alpha = 0,05$ artinya secara statistik Belanja daerah program sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Pertanian, sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama ditolak.

H2: Diduga Belanja daerah program sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan tabel diatas diketahui Belanja daerah program sektor pertanian terhadap Kemiskinan (X1 → Y) dilihat *p-value* sebesar 0,043 < dari $\alpha = 0,05$ artinya secara statistik Belanja daerah program sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima.

H3: Diduga Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap PDRB Pertanian di Kalimantan Selatan. Berdasarkan tabel diatas diketahui Dana Desa terhadap PDRB Pertanian (X2 → Z) dilihat *p-value* sebesar 0,597 > dari $\alpha = 0,05$ artinya secara statistik Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Pertanian, sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga ditolak.

H4: Diduga Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan tabel diatas diketahui Dana Desa terhadap Kemiskinan ($X_2 \rightarrow Y$) didapat *p-value* sebesar 0,008 dimana lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ artinya secara statistik Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan hipotesis keempat diterima.

H5: Diduga PDRB Pertanian berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan tabel diatas diketahui PDRB Pertanian terhadap Kemiskinan ($Z \rightarrow Y$) dilihat *p-value* sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$ artinya secara statistik PDRB Pertanian berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan hipotesis kelima diterima.

Tabel 3. Hasil Output Pengujian Hipotesis Mediasi

| Variabel | T Statistik | P Value |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Belanja Pertanian (X_1) \rightarrow PDRB Pertanian (Z) \rightarrow Kemiskinan (Y) | 0,771 | 0,441 |
| Dana Desa (X_2) \rightarrow PDRB Pertanian (Z) \rightarrow Kemiskinan (Y) | 0,511 | 0,609 |

Sumber : hasil penelitian, 2021

H6: Diduga Belanja daerah program sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan melalui PDRB Pertanian. Berdasarkan tabel diatas diketahui Belanja daerah program sektor pertanian terhadap Kemiskinan melalui PDRB Pertanian ($X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y$) didapat *p-value* sebesar 0,441 dimana lebih besar dari $\alpha = 0,05$ artinya secara statistik Belanja daerah program sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan jika melalui PDRB Pertanian, sehingga dapat disimpulkan hipotesis keenam ditolak.

H7: Diduga Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan melalui PDRB Pertanian. Berdasarkan tabel diatas diketahui Dana Desa terhadap Kemiskinan melalui PDRB Pertanian ($X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y$) didapat *p-value* sebesar 0,609 dimana lebih besar dari $\alpha = 0,05$ artinya secara statistik Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan jika melalui PDRB Pertanian, sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketujuh ditolak

Pembahasan

Belanja Daerah Program Sektor Pertanian Tidak Berpengaruh Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Belanja daerah program sektor pertanian terhadap PDRB Pertanian diperoleh *p-value* sebesar $0,426 > 0,05$ artinya secara statistik Belanja daerah program sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Pertanian. Artinya pengeluaran pemerintah Belanja Daerah Program Sektor Pertanian pada Tahun 2015-2018 terhadap PDRB sektor pertanian belum sepenuhnya mampu meningkat secara signifikan atau tidak memberikan dampak secara langsung. Sejalan hasil sebelumnya (Marain, Domai, & Suryadi, 2014), bahwa belanja sektor pertanian oleh daerah masih berpengaruh kurang/tidak signifikan terhadap kinerja sektor pertanian.

Secara keseluruhan jika dilihat perkembangan belanja daerah sektor pertanian dari tahun 2015-2018 pada 11 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian fluktuatif dan sebagian cenderung mengalami penurunan. Dari tahun 2015 sampai dengan 2018 Kab Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, cenderung mengalami penurunan cukup signifikan.

Hasil penelitian ini dapat dilihat dalam pembangunan sektor pertanian dari belanja yang dikeluarkan untuk membiayai program-program pertanian masih belum di katakan optimal. Padahal sektor pertanian memiliki kontribusi relatif masih lebih baik dari sektor-sektor yang lain dalam PDRB dan bisa dikategorikan sebagai sektor unggulan dari tahun 2015-2018 pada 11 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada

penelitian ini membuktikan masih bergantung pada peran pemerintah dalam pembiayaan sektor yang lain, misalkan pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

Sejalan pendapat Keynes, pendapatan nasional mencakup komponen pengeluaran pemerintah. Peran pengeluaran pemerintah akan sejalan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Dalam hasil penelitian ini, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja program aktifitas pertanian tidak berdampak pada PDRB sektor pertanian. Hal ini membuktikan masih perlunya peran pemerintah dalam pembiayaan sektor lain, misalkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Belanja Daerah Program Sektor Pertanian Berpengaruh Terhadap Angka Kemiskinan Di Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Belanja daerah program sektor pertanian terhadap Kemiskinan diperoleh *p-value* sama dengan $0,043 < 0,05$, artinya secara statistik Belanja daerah program sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Artinya pengeluaran pemerintah Belanja Daerah Program Sektor Pertanian pada Tahun 2015-2018 terhadap Angka Kemiskinan sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau memberikan dampak secara langsung.

Belanja Daerah Program Sektor Pertanian merupakan hal yang sangat penting dan menentukan kegiatan ekonomi di suatu daerah pedesaan. Hal ini sejalan bahwa tanpa adanya Belanja Daerah Program Sektor Pertanian yang memadai akan menciptakan stagnasi kegiatan ekonomi di dalam daerah maupun pedesaan kemudian angka kemiskinan semakin meningkat. Sehingga pentingnya penggunaan belanja pertanian yang efektif dan efisien, kemudian sektor pertanian dapat tumbuh dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian kemudian menurunkan angka kemiskinan. Hal ini berbeda hasil sebelumnya oleh Sari (2018), menyatakan bahwa belanja pemerintah sektor pekerjaan umum tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Dana Desa Tidak Berpengaruh Terhadap PDRB Sektor Pertanian Di Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dana Desa terhadap PDRB Pertanian diperoleh *p-value* sebesar 0,597 nilai ini lebih besar dari 0,05 artinya secara statistik Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Pertanian. Artinya pengeluaran pemerintah pada Dana Desa pada Tahun 2015-2018 terhadap PDRB Sektor Pertanian belum sepenuhnya mampu meningkatkan secara signifikan atau memberikan dampak secara langsung.

Hasil Dana Desa belum maksimal memberikan manfaat terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kalimantan Selatan, kemungkinan disebabkan kurang begitu maksimal sosialisasi secara maksimal, kemudian kemampuan sumber daya manusia yang masih belum siap hingga level desa, kemudian penggunaan dana desa yang diluar prioritas pembangunan Sektor Pertanian. Disisi lain, dikarenakan dalam penggunaan dana desa masih sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur fisik pedesaan dan potensi minimnya penggunaan untuk pemberdayaan pertanian.

Seperti pendapat salah satu inisiator lahirnya Undang-Undang Desa Budiman Sujatmiko, yang memaparkan rumus untuk membangun desa yang sejahtera dan berdaya. Beliau menilai, realisasi dana desa masih belum terserap secara penuh. Menurut Budiman, keadaan perekonomian masyarakat desa cenderung masih hidup ditengah garis kemiskinan.

Dana Desa Berpengaruh Terhadap Angka Kemiskinan Di Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dana Desa terhadap Kemiskinan diperoleh *p-value* sebesar $0,008 < 0,05$ artinya secara statistik Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Artinya pengeluaran pemerintah pada Dana Desa pada Tahun 2015-2018 terhadap Angka Kemiskinan sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau memberikan dampak secara langsung. Informasi ini sejalan hasil sebelumnya (Agustina, Valeriani, & Putri, 2021; Fitri & Anwar, 2019; Sigit & Kosasih, 2020; Susilowati, Susilowati, & Hadi, 2017; Yusniati, Murhaban, & Khaddafi, 2019), bahwa dana alokasi pembangunan desa mampu menurunkan pada tingkat kemiskinan.

Manajemen dana desa yang baik mampu meningkatkan kemandirian masyarakat secara keseluruhan, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan. Sejalan dengan PP Nomor 60 2014, bahwa dana desa ditujukan untuk pembangunan serta pemberdayaannya. Dana desa bertujuan untuk pengoptimalan kesejahteraan, kualitas hidup, pengentasan kemiskinan melalui terselenggaranya pengoptimalan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan.

PDRB Sektor Pertanian Berpengaruh Terhadap Angka Kemiskinan Di Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui PDRB Pertanian terhadap Kemiskinan diperoleh *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan PDRB Sektor Pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Artinya PDRB Sektor Pertanian pada Tahun 2015-2018 terhadap Angka Kemiskinan sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau memberikan dampak secara langsung.

Secara keseluruhan jika dilihat perkembangan total produksi sektor pertanian dari tahun 2015-2018 pada 11 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan relatif meningkat. Dengan demikian perlu ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga tingkat kemiskinan di 11 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan menurun pada setiap tahun. Pihak pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam hal PDRB Sektor Pertanian sebagai skala prioritas dalam upaya menanggulangi tingkat kemiskinan, dengan meningkatkan PDRB Sektor Pertanian melalui berbagai upaya mendorong jumlah penduduk miskin, khususnya dalam memastikan dan mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang didapatkan dari PDRB Sektor Pertanian di mana penduduk miskin bekerja di pertanian. Hal ini sejalan dengan hasil sebelumnya oleh John (2018), bahwa aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan berdampak signifikan secara jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan.

Belanja Daerah Program Sektor Pertanian Tidak Berpengaruh Terhadap Angka Kemiskinan Di Kalimantan Selatan Melalui PDRB Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Belanja daerah program sektor pertanian terhadap Kemiskinan melalui PDRB Pertanian diperoleh *p-value* sebesar $0,441 > 0,05$ yang artinya secara statistik Belanja daerah program sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan jika melalui PDRB Pertanian.

Pengeluaran pemerintah Belanja Daerah Program Sektor Pertanian pada Tahun 2015-2018 melalui Melalui PDRB Sektor Pertanian terhadap Angka Kemiskinan belum sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau tidak memberikan dampak secara tidak langsung.

Dana Desa Tidak Berpengaruh Terhadap Angka Kemiskinan Di Kalimantan Selatan Melalui PDRB Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dana Desa terhadap Kemiskinan melalui PDRB Pertanian diperoleh *p-value* sebesar $0,609 > 0,05$ artinya secara statistik Dana Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan jika melalui PDRB Pertanian. Artinya pengeluaran Dana Desa pada Tahun 2015-2018 melalui Melalui PDRB Sektor Pertanian terhadap Angka Kemiskinan belum sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau tidak memberikan dampak secara tidak langsung

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menggambarkan beberapa implikasi tentang belanja daerah, dana desa, dan efeknya terhadap PDRB pertanian dan kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Pertama, Belanja Daerah Program Sektor Pertanian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PDRB Sektor Pertanian di Kalimantan Selatan. Artinya pengeluaran pemerintah Belanja Daerah Program Sektor Pertanian pada Tahun 2015-2018 terhadap PDRB sektor pertanian belum sepenuhnya mampu meningkat secara signifikan atau tidak memberikan dampak secara langsung.

Kedua, Belanja Daerah Program Sektor Pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Artinya pengeluaran pemerintah Belanja Daerah Program Sektor Pertanian pada Tahun 2015-2018 terhadap Angka Kemiskinan sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau memberikan dampak secara langsung.

Ketiga, Dana Desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Sektor Pertanian di Kalimantan Selatan. Artinya pengeluaran pemerintah pada Dana Desa pada Tahun 2015-2018 terhadap PDRB Sektor Pertanian belum sepenuhnya mampu meningkatkan secara signifikan atau memberikan dampak secara langsung.

Ke empat, Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Artinya pengeluaran pemerintah pada Dana Desa pada Tahun 2015-2018 terhadap Angka Kemiskinan sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau memberikan dampak secara langsung.

Ke lima, PDRB Sektor Pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap Angka Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Artinya PDRB Sektor Pertanian pada Tahun 2015-2018 terhadap Angka Kemiskinan sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau memberikan dampak secara langsung.

Ke enam, Belanja Daerah Program Sektor Pertanian Melalui PDRB Sektor Pertanian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan Angka Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Artinya pengeluaran pemerintah Belanja Daerah Program Sektor Pertanian pada Tahun 2015-2018 melalui Melalui PDRB Sektor Pertanian terhadap Angka Kemiskinan belum sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau tidak memberikan dampak secara tidak langsung.

Ke tujuh, Dana Desa Melalui PDRB Sektor Pertanian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan Angka Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Artinya pengeluaran Dana Desa pada Tahun 2015-2018 melalui Melalui PDRB Sektor Pertanian terhadap Angka Kemiskinan belum sepenuhnya mampu menurunkan secara signifikan atau tidak memberikan dampak secara tidak langsung.

Meskipun belanja sektor pertanian tidak memiliki pengaruh signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian perlu meningkatkan pengeluaran belanja di sektor pertanian dengan memprioritaskan skala unggulan. Salah satu contoh, dapat berupa program pemberdayaan di bidang pertanian, program pengembangan teknologi pertanian, sehingga pengeluaran fektif, kemudian sektor pertanian dapat berkembang pesat dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian kemudian menurunkan angka kemiskinan.

Belanja sektor pertanian dan dana desa bisa diarahkan untuk kepentingan pembangunan industri pertanian berbasis teknologi, termasuk di dalamnya industri hasil pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Dengan cara mengarah ke teknologi, orang desa punya akses langsung ke pasar, kemudian harga yang ada di pasaran membuat masyarakat desa untung dan akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Belanja sektor pertanian dan dana desa bisa diarahkan pendidikan masyarakat, dengan belajar ilmu pengetahuan, seperti ilmu teknologi pertanian dan ilmu manajemen. Sehingga mereka dapat menggali potensi-potensi di pedesaan, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, kemudian diserap tenaga kerja dan akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan. Penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., Valeriani, D., & Putri, A. K. (2021). The Relationship of Village Funds to Poverty and Economic Growth in Bangka Belitung Islands. *PARETO : Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 1–16.
- Fitri, A., & Anwar, K. (2019). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Gampong Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomika Regional Unimal*, 2(3), 1–7.

- John, M. A., & Dankawu, M. U. (2018). Effect of Agriculture on Poverty Reduction in Nigeria : A Multifaceted Approach Using Principal Component Analysis. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 23(6), 35–43. <https://doi.org/10.9790/0837-2306093543>
- Marain, Y. Y., Domai, T., & Suryadi. (2014). Analisis Belanja Daerah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Dan Kinerja Sektor Pertanian Di Kota Malang. *Wacana*, 17(4), 223–233.
- Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 128–136. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.23411>
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526.
- Yusniati, Murhaban, & Khaddafi. (2019). Pengaruh Komponen Alokasi Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 4(1), 59–85.